

ABSTRAK

Pemalsuan Persyaratan Data Permohonan Dana Kredit Usaha Rakyat Dalam Perbankan Oleh Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah

Oleh :

Nurhaziza Zavera, Arif Santoso, S.H.,M.Si., Hidayat Andyanto, S.H.,M.Si.

Perbuatan memalsukan surat dilakukan dengan cara melakukan perubahan-perubahan tanpa hak (tanpa izin yang berhak) dalam suatu surat atau tulisan, perubahan nama dapat mengenai tanda tangannya maupun mengenai isinya, walaupun sebelumnya merupakan suatu yang tidak benar atau sesuatu yang benar dalam proses pengajuan Bantuan Sosial (BANSOS) dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR) sehingga penulis mengangkat permasalahan bentuk pemalsuan data persyaratan permohonan dana KUR oleh pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan pemalsuan data persyaratan permohonan dana KUR oleh pelaku UMKM.

Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengkaji dan menganalisis bentuk pemalsuan data persyaratan permohonan dana KUR oleh pelaku UMKM dan Untuk mengkaji dan menganalisis pemalsuan data persyaratan permohonan dana KUR oleh pelaku UMKM.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan analisis tentang penyimpangan penyaluran dana Bansos ini dibahas dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*) agar dapat diketahui duduk persoalan yang sesungguhnya dan dikemukakan pendapat dalam bentuk saran tindakan yang dapat dilakukan oleh pihak terkait.

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa : (1) Penggunaan dokumen palsu dimaksudkan untuk dapat mengelabui petugas sehingga mereka dapat memungkinkan mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan data palsu tersebut sehingga penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya. (2) akibat hukum jika dilihat dari tindak pidana berkaitan dengan perizinan maka siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia bisa diancam dengan pidana penjara serta denda dalam hal kegiatan dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi.

Kata Kunci : Pemalsuan Data Permohonan Dana KUR

ABSTRACT

Falsification of Data Requirements for Application for Kur Funds in Banking by MSME Actors

Oleh :

Nurhaziza Zavera, Arif Santoso, S.H.,M.Si., Hidayat Andyanto, S.H.,M.Si.

The act of falsifying a letter is carried out by making unauthorized changes (without the rightful permission) in a letter or writing, a change of name can be regarding his signature or regarding its contents, even though previously it was something that was not true or something true in the process of applying for Social Assistance (BANSOS) in the form of People's Business Credit (KUR) so that the author raises the problem of falsification of data on requirements for KUR funds applications by Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) and falsification of data on requirements for KUR funds applications by SMEs.

The purpose of this study is to examine and analyze the form of falsification of data on requirements for KUR funding applications by MSME actors and to examine and analyze falsification of data on requirements for KUR funds application by MSME actors.

This study uses a normative juridical research method with an analysis of deviations in the distribution of social assistance funds. This study is discussed with a statutory approach and a case approach so that the real problems can be identified and opinions are expressed in the form of suggestions for actions that can be taken by the government. related parties.

The results of this study state that: (1) The use of forged documents is intended to be able to trick the officers so that they can get what they want with the fake data so that prosecutions against these agencies are carried out either against those who gave the order to carry out the act or those who acted. as a leader in the act or both. (2) legal consequences when viewed from criminal acts related to licensing, whoever collects funds from the public in the form of savings without a business license from the leadership of Bank Indonesia can be threatened with imprisonment and fines if the activities are carried out by a legal entity in the form of a limited liability company, union, foundation or cooperative.

Keywords: Forgery of KUR Fund Application Data.